



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

PERJANJIAN KINERJA | 2020





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2020 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2020.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 15 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUDI KARYA SUMADI

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi darat	rasio	0,64
			IKP 2	Peningkatan tingkat keterpaduan antarmoda terhadap baseline 2019	%	14,29
2	SP2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	IKP 3a	Tingkat keselamatan angkutan penyeberangan	rasio	0,088
			IKP 3b	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	3
			IKP 3c	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50
			IKP 3d	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan AKAP dan Angkutan Pariwisata per 10.000 armada terhadap baseline 2019	%	2
			IKP 3e	Persentase pemenuhan aspek keselamatan administrasi dan teknis pada bus AKAP dan Pariwisata	%	73
			IKP 4	Persentase penerapan sterilisasi area pada simpul transportasi darat	%	9,55
3	SP3	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKP 5	Persentase tingkat pelayanan $\geq C$ pada jaringan jalan nasional	%	25
			IKP 6	Rata-rata <i>On Time Performance</i> (OTP) pada lintas penyeberangan utama	%	83
			IKP 7	Penilaian publik atas penyelenggaraan angkutan lebaran	Nilai	4
4	SP4	Meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	IKP 8a	Rata-rata peningkatan jumlah penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang diterapkan <i>Buy The Service</i> terhadap baseline 2020	%	-

PROGRAM

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

ANGGARAN

Rp 5.895.971.800.000

Jakarta, 15 Januari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



2020



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id